BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Konstruksi Hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Perumahan dan Permukiman Kumuh adalah berlandaskan pada Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang menjadikan Pengaturan Permukiman Kumuh merupakan Sub Urusan Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman yang mewajibkan Pemerintah Daerah membentuk Perda tentang Perumahan dan Permukiman Kumuh (Pasal 98 ayat 3 dan Pasal 94 ayat 3).
2. Faktor-faktor penghambat dalam pembuataan perda tentang kawasan perumahan dan permukiman kumuh terbagi 2 yaitu belum tersedianya Dokumen Teknis dan Belum diakomodirnya Perda tentang Perumahan dan Kawasan kumuh dalamn Prolegda tahun 2017.

5.2 Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bone Bolango seharusnya membuat dokumen teknis RP2KP.
2. Pemerintah seharusnya membuat perda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di kabupaten bone bolango sebagaimana konstruksi hukum yang telah di jelaskan diatas dan diwujudkan dalam prolegda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bagir Manan, 2001.*Menyongsong Fajar Otonomi Daerah Di Republik Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII

Bambang Sunggono, 2013. *Metode Penelitian Huku*m. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Budiharjo, 2005.*Tata Ruang Perkotaan*.Bandung: Alumni

Budiyanto, 2003.*Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga

C.S.T. Kansil, 1986.*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

_____, 2001.*Pemerintahan Derah Di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.

Dirjen Cipta Karya. 2016. *Panduan Pendampingan Dirjen Cipta Karya*. 2016. Jakarta: Panduan Pendampingan Penyusunan Raperda Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kementerian PU Pera.

Eko Budiharjo, 1997.*Tata Ruang Perkotaan*. Bandung: Alumni

Philipus M. Hadjon dkk, 2008.*Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada Uneversity Press.

Piran Wroatmojo, 2001. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

Marbun SF, 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia,* (Yogyakarta; FH UII Press.

Novendri M. Nggilu, 2014, *Hukum dan Teori Konstitusi perubahan konstitusi yang partisipatif dan populi),* Yogyakarta; UII Press.

Ridwan HR, 2006.*Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Rusdianto Sesung, 2013.*Hukum Otonomi Daerah (NegaraKesatuan, Daerah Istimewa, Dan Daerah Otonomi Khusus)*.Surabaya: Refika Aditama

Saripudin Bebyl, 2004.*Tata Negara*. Bandung: Grafindo Media Pratama.

Suratman, Phipilps Dillah, 2014, "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung, Alfabeta.

Syamsuddin Haris, 2007.*Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Desentralisasi,Demokratisasi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah)*.Jakarta: LIPI Press

Jalaluddin, tp.t. Hakikat Dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik.*Artikel*

Muhammad Suharjono, 2014. Pembentukan Peraturan Daerah Responsif dalam Mendukung Otonomi Daerah. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*

Maria Farida Indarti S, 2007, *Ilmu perundang-undangan, jenis, fungsi dan materi muatan,* Yogyakarta; Kanisius.

Suparto, 2014. Evaluasi Pemukiman Dan Perumahan Kumuh Berbasis Lingkungan Di Kel. Kalibanteng Kidul Kota Semarang. *Jurnal*, Maret. XXI(1)

Undang-undang

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Undang Undang Negara Republik Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman

Undang Undang Negara Republik Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Novendri M. Nggilu dkk. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan Dan peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Model Peraturan daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, 2017

Jurnal

Himawan Estu Bagijo, tp.t. Pembentukan Peraturan Daerah

Yusdiyanto, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Program Legislasi Daerah", Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012

Hendaru Tri Hanggoro, "Masalah permukiman di kota: sejarah permukiman kumuh di Jakarta1960-1969", Perpustakaan Universitas Indonesia.

Ngakan Putu Sueca, "Permukiman Kumuh Masalah atau Solusi ?", Jurnal Permukiman Kumuh Vol. 2 No. 2 Agustus 2004.

Ria Casmi Arrsa, Restorasi Politik Legislasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Riset, Jurnal RechtsVinding, Volume 2 Nomor 3, Desember 2013

The Habibie Center (THC) dan Hans Seidel Foundation (HSF), dalam Saldi Isra, Urgensi Naskah Akademik Dalam Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, 2009

Internet

http://kbbi.web.id/urgensi

http://ejournalfia.ub.ac.id/index.php/jiap

http://www.kompasiana.com/simonmanalu/konsep-otonomi-daerah-good governance-dan-reinventing-government-dalam-pembangunan-daerah_54f97771a333111a648b46a8

http://studyandlearningnow.blogspot.co.id

http://digilib.unila.ac.id/8615/13/BAB%20II.pdf

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bone_Bolango

LAMPIRAN

DOKUMENTASI

Wawancara bersama Bapak Arman Lalu, selaku kepala Desa Olohuta Utara

Wawancara bersama Bapak Armin Biri, ST, Selaku Kepada Bidang Perumahan Rakyat, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertahanan Kabupaten Bone Bolango

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Curriculum Vitae

Data Pribadi / *Personal Details*

Andrianus Suleman, di lahirkan Gorontalo pada tangga 09 Juni 1995 dari pasangan yang seiman dan sekeyakinan, anak Pertama dari **Bapak (Alm) Simon Olilingo Suleman** dan **Ibu (Almh) Amrina Mustapa.** Menjadi mahasiswa Strata Satu (S-1) di Universitas Negeri Gorontalo, dengan NIM 271 413 023 pada jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum sejak tahun 2013 sampai 2017.

Pendidikan / *Education*

Formal

a. Sekolah Dasar Negeri SDN 75 Kota Timur, Gorontalo, masuk pada Tahun 2001 dan Lulus pada Tahun 2007

b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah 3 Gorontalo, masuk pada Tahun 2007 dan Lulus pada Tahun 2010.

c. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Gorontalo, masuk pada Tahun 2010 dan Lulus pada Tahun 2013.

d. Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Hukum, Jurusan ilmu Hukum (Konsentrasi Hukum Tata Negara) masuk pada Tahun 2013 dan Lulus pada Tahun 2017.

Non Formal

a. Peserta Masa Orientasi Mahasiswa Baru Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
b. Peserta Proses Kaderisasi Gerakan Mahasiswa Peduli Aspirasi Rakyat Tahun 2013.
c. Peserta Penyelenggaran Forum Debat Hukum Dan Konstitusi Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2013.
d. Anggota Bidang Kaderisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
e. Anggota Bidang Eksternal Forum Debat Hukum dan Konstitusi Merah Maron Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014.
f. Peserta Seminar Nasional Komisi Yudisial Republik Indonesia Tahun 2014..
g. Peserta Musyawarah Nasional I Lembaga Debat Hukum Dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia Tahun Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
h. Peserta Sosialisasi 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
i. Sekretaris Departemen Kajian,Strategi Dan Paham Organisasi Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Periode 2015-2016.
j. Panitia Debat Hukum dan Konstitusi Mahasiswa Indonesia se-Provinsi Gorontalo Tahun 2015.
k. Panitia Seminar Nasional Oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia di Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2015.
l. Anggota Kemasan Hukum Tata Negara Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2014-2017.
m. Peserta Musyawarah Nasional II Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Indonesia di Universitas Jayabaya Jakarta Tahun 2016.

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR : 28.a/KEP/BUP.BB/123/2017
TANGGAL : 13 JANUARI 2017
PERIHAL : PENETAPAN LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2017

LOKASI LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH
DI KABUPATEN BONE BOLANGO

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	KETERANGAN
1.	KABILA	PADENGO	9,79	KUMUH BERAT
		OLUHUTA	5,13	KUMUH BERAT
		OLUHUTA UTARA	8,00	KUMUH BERAT
		TUMBIHE	5,21	KUMUH BERAT
		PAUWO	4,61	KUMUH BERAT
		DUTOHE	8,00	KUMUH BERAT
		TANGGILINGO	1,12	KUMUH BERAT
		PAUWO BARAT	3,67	KUMUH BERAT
2.	TILONGKABILA	TAMBOO	7,87	KUMUH SEDANG
		TUNGGULO	9,15	KUMUH RENDAH
3.	BOTUPINGGE	TIMBUOLO TIMUR	9,35	KUMUH SEDANG
		PANGGULO BARAT	5,59	KUMUH SEDANG
4.	BONEPANTAI	BILUNGALA	7,26	KUMUH RENDAH
5	BULAWA	DUNGGILATA	8,91	KUMUH SEDANG
		MOPUYA	6,97	KUMUH SEDANG
		PATOA	3,39	KUMUH RENDAH
6.	BONE	MONANO	4,63	KUMUH RENDAH
		TUMBUH MEKAR	3,95	KUMUH RENDAH
		CENDANA PUTIH	1,95	KUMUH RENDAH
		MOLAMAHU	3,85	KUMUH RENDAH
7.	SUWAWA	BUBEYA	5,90	KUMUH BERAT
		BUBE BARU	6,21	KUMUH BERAT
8.	SUWAWA TENGAH	DUANO	7,78	KUMUH BERAT
		LOMBONGO	6,00	KUMUH SEDANG
9.	SUWAWA TIMUR	DUMBAYA BULAN	7,35	KUMUH BERAT
		TILANGOBULA	6,00	KUMUH RENDAH

SALINAN

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	LUAS KAWASAN KUMUH (Ha)	KETERANGAN
		PANGI	3,48	KUMUH RENDAH
10.	TAPA	TALULOBUTU	22,1	KUMUH BERAT
		TALULOBUTU SELATAN	15,3	KUMUH BERAT
		TALUMOPATU	26,4	KUMUH BERAT
11.	BULANGO UTARA	TULOA	5,35	KUMUH RENDAH
12.	BULANGO ULU	MONGIILO	2,53	KUMUH RENDAH
13.	KABILA BONE	MODELOMO	5,42	KUMUH SEDANG
		MOLUTABU	6,67	KUMUH SEDANG
14.	BONE RAYA	INOMATA	6,99	KUMUH RENDAH
		TOMBULILATO	6,75	KUMUH RENDAH
		MOOPIYA	4,64	KUMUH RENDAH
		MOOTINELO	4,81	KUMUH SEDANG
		LAUT BIRU	6,19	KUMUH SEDANG
JUMLAH			274,27	

BUPATI BONE BOLANGO,

TTD + CAP

HAMIM POU

Salinan Telah Sesuai Dengan Naskah Aslinya
an. Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango
Asisten Bidang Pemerintahan
u.b.
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
PENATA TINGKAT I/III.D
NIP. 19730606 200604 1 031

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
FAKULTAS HUKUM
Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:http://www.ung.ac.id

Nomor : 1390 /UN47.B9.1/KM/2017 02 Oktober 2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kabupaten Bone Bolango
Di Gorontalo

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul ***"Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Dan Pencegahan Peningkatan Kualitas Perumahan Dan Pemukiman Kumuh (Studi Kasus Di Kabupaten Bone Bolango)."*** Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama	: Andrianus Suleman
NIM	: 271 413 023
Angkatan	: 2013/2014
Program Studi	: Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan	: Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 002

Tembusan Yth:
1. Kepala Dinas Perumahan Dan Pemukiman Kab. Bone Bolango
2. Anggota Daerah Bone Bolango
3. Tokoh Masyarakat Kab. Bone Bolango

BUPATI BONE BOLANGO

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 200/BKB-POL/207/X/2017

a. Dasar : a. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
d. Perda No 10 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.

b. Menimbang : Surat Dari Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum Jurusan Hukum / Ilmu Hukum Nomor : 1390 / UN47.B9.1 / KM / 2017 Tanggal 02 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Penelitian / Rekomendasi Penelitian.

Bupati, memberikan rekomendasi kepada :

a. Nama / Obyek : **ANDRIANUS SULEMAN**
b. NIM : 271 413 023
c. Jabatan/Tempat /Identitas : Peneliti / JL. Taman Surya RT.001 RW.001 Kel/Desa Dembe II Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo / No. KTP. 7571030906950002
c. Untuk :
1. Melakukan penelitian dengan Judul Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah dan Pencegahan Peningkatan Kualitas Perumahan dan Pemukiman Kumuh (Studi Kasus di Kab. Bone Bolango)
2. Lokasi penelitian : Dinas Perumahan dan Pemukiman Kab. Bone Bolango
3. Waktu / Lama Penelitian : 03 Oktober – 03 Nopember 2017
4. Status Penelitian : Baru

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Suwawa, 03 Oktober 2017
a.n BUPATI BONE BOLANGO
KEPALA BADAN KESBANG

PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs. ZULKARNAIN GELA
Pembina Utama Muda
NIP. 19580912 199012 1 001